



MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN
REPUBLIC INDONESIA

CERAMAH PEMBEKALAN
MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN
KEPADA
PERWIRA SISWA SESKO ANGKATAN/SESPIM POLRI
DALAM RANGKA PEMBEKALAN PKB KEJUANGAN
TANGGAL 30 JANUARI 1996

Sesuai dengan permintaan Kalayek PKB Kejuangan, judul ceramah pembekalan ini adalah "Kebijaksanaan Pembangunan Komponen Kekuatan Hankam Negara Guna Mendukung Perwujudan Postur ABRI yang Profesional, Efektif, Efisien dan Modern (PEEM) Pada Pelita VII".

Penjelasannya akan dikaitkan dengan tema Seminar PKB Kejuangan antar Sesko Angkatan/Sespim Polri yaitu "Dengan Semangat Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana, Kita Mantapkan Sistem dan Metoda Pembinaan Kemampuan dan Kekuatan ABRI Sebagai Pejuang Prajurit dan Prajurit Pejuang yang Profesional dengan Jati Diri Bangsa yang Kuat, dalam Rangka ABRI yang Profesional, Efektif, Efisien dan Modern".

Dari tema seminar dan judul pembekalan dapat diidentifikasi hubungan keterkaitannya yaitu:

Pertama, sistem dan metoda pembinaan kemampuan dan kekuatan ABRI pada hakekatnya adalah suatu wahana dan kerangka kerja, dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan berdasarkan suatu rencana dan sasaran yang ditetapkan.

Kedua, postur ABRI PEEM adalah sasaran yang ingin dicapai melalui pembinaan komponen utama kekuatan Hankamneg yang didukung oleh komponen lainnya yaitu ratih, Linmas dan pendukung.

Ketiga, semangat Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana, Pejuang Prajurit dan Prajurit Pejuang yang Profesional pada hakekatnya adalah landasan hakiki dalam mewujudkan postur ABRI yang PEEM.

Analisa keterkaitan ketiga hal di atas pada dasarnya merupakan masalah pokok manajemen Hankam Negara, oleh sebab itulah maka alur ceramah pembekalan ini akan didekati melalui kaidah manajemen dengan benang emas nilai-nilai kejuangan yang menjadi topik bahasan para perwira siswa masing-masing Sesko Angkatan/Sespim Polri sesuai penugasannya.

Memasuki paruh kedua Dasawarsa 1990-an kita tengah memasuki suatu babak baru dalam sejarah dunia. Perkembangan lingkungan strategis dunia menunjukkan gelagat perubahan yang besar dan mendasar baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Apakah dunia akan memasuki era kehidupan baru yang lebih baik dari abad XX, masih merupakan teka-teki.

Abad XX adalah abad yang besar dalam kehidupan umat manusia. Abad ini ditandai

oleh pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, kemajuan-kemajuan besar dalam ilmu fisika dan teknologi ruang angkasa, munculnya negara komunis dan pecahnya dua perang dunia yang mengubah skala perang menjadi tidak terbatas serta bangkitnya negara-negara terjajah. Memasuki pertengahan abad XX umat manusia diliputi kecemasan akan masa depannya yang semakin suram karena pertentangan dua adikuasa, yang mendorong ke arah pecahnya perang dunia ketiga, tetapi memasuki dasawarsa terakhir abad XX ini harapan umat manusia akan kehidupan yang damai bangkit kembali.

Beberapa trend perkembangan dunia menjelang akhir abad ke XX adalah sebagai berikut:

1. Di bidang politik sistem komunis mulai runtuh dan pengaruhnya di banyak negara mulai surut, namun tidak berarti bahwa ideologi komunis akan hilang, taktik-taktik teror dan subversinya tidak akan ditinggalkan oleh golongan-golongan ekstrim. Apabila di negara-negara komunis sistem komunis mulai diganti dengan sistem demokrasi multi partai, maka di negara-negara demokrasi sistem demokrasi perwakilan mulai condong ke sistem demokrasi partisipatif. Suara-suara di luar parlemen mulai ikut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional. Dalam pergaulan antar bangsa kepentingan politik dan ideologi mulai tergeser oleh kepentingan ekonomi, sehingga masalah ekonomi semakin menonjol. Paradigma geo-politik terdesak oleh paradigma geo-ekonomi.

2. Di bidang ekonomi fenomena yang menonjol adalah globalisasi ekonomi, tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional yang beroperasi mengabaikan batas wilayah negara. Persaingan dalam pasar internasional pun semakin ketat, hanya produk yang berkualitas tinggi dan pengusaha yang bertaraf internasional akan mampu berkembang. Ketinggalan yang harus dikejar oleh negara-negara berkembang semakin jauh, sehingga banyak negara berkembang mulai menempuh strategi baru yang memungkinkan berperan dalam kegiatan ekonomi internasional. Hal yang sangat memprihatinkan adalah mening-

katnya kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat eksploitasi sumber daya alam dan industrialisasi yang kurang mengindahkan faktor ekologi.

3. Di bidang sosial-budaya, globalisasi nilai-nilai sosial budaya sebagai akibat kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, menimbulkan mobilitas informasi dan manusia menjadi sangat tinggi. Di satu sisi keadaan ini akan mendorong percepatan kemajuan masyarakat yang didukung tradisi yang konservatif. Di sisi lain apabila prosesnya tidak terkendali akan menimbulkan erosi nilai-nilai dasar yang menjadi jati diri suatu bangsa. Masalah sosial-budaya pada akhir abad XX menunjukkan gelagat semakin bergesernya orientasi generasi muda dari orientasi nasional ke orientasi global.

4. Di bidang pertahanan keamanan memang ada gelagat semakin meredanya pertentangan kepentingan militer antar negara, namun konflik-konflik internal cenderung akan semakin menonjol, baik yang berlatar belakang perbedaan etnis, agama maupun masalah perbatasan. Semangat nasionalisme golongan-golongan etnis yang berada di bawah kekuasaan sistem komunis, tengah bangkit menuntut kemerdekaannya. Apabila semua suku bangsa, kelompok agama tertentu saling berlomba untuk menentukan nasib sendiri, dalam arti membentuk negara baru yang terlepas dari negara induknya, maka dunia akan menghadapi kekacauan baru.

Selanjutnya marilah kita tinjau perkembangan lingkungan strategis dalam negeri yang tengah menghadapkan bangsa Indonesia kepada tantangan yang semakin berat. Selain tantangan untuk dapat mencapai sasaran lepas landas pada akhir repelita VI, juga posisi wilayah negara berada pada salah satu jalan silang dunia yang utama, maka bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan lingkungan strategis eksternal dan internal yang sama beratnya.

1. Di bidang politik tuntutan terhadap diwujudkan sistem demokrasi Pancasila dengan mekanisme partisipasi masyarakat semakin mendesak. Kesadaran dan kewaspadaan politik rakyat semakin meningkat, sehingga perlu mendapat

pembinaan yang tepat yang mengarah kepada peningkatan tanggung jawab bersama atas keselamatan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Di bidang ekonomi, tuntutan pemerataan sebagai perwujudan partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi semakin menonjol. Kesadaran spasial dalam pembangunan ekonomi juga semakin nyata, sehingga kegiatan ekonomi mulai didorong ke arah timur. Hambatan keterbatasan lapangan kerja dan meningkatnya pencari kerja tetap akan menjadi masalah yang harus dipecahkan bersama oleh pemerintah dan sektor swasta. Semakin besarnya peranan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi menuntut peningkatan pembinaan kader-kader wirasaha baik kualitas maupun kuantitas yang profesional dan bertaraf internasional.

3. Di bidang sosial-budaya semakin terasa perlunya peningkatan penghayatan kebudayaan nasional dan pengembangannya sesuai kemajuan jaman, agar mampu mencegah terjadinya erosi kepribadian bangsa, yang pada gilirannya akan mencairkan patriotisme bangsa Indonesia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu keharusan yang semakin mendesak. Keluaran sistem pendidikan yang tengah ditingkatkan kualitasnya melalui pertajaman fungsi dan persyaratan pendidikan tingkat menengah, yaitu membedakan secara tajam fungsi dan persyaratan antara pendidikan yang bersifat umum untuk persiapan ke perguruan tinggi, dengan pendidikan kejuruan untuk menghasilkan tenaga menengah siap kerja. Dengan demikian sejak awal akan dapat dirintis pembinaan sumber daya manusia dalam dua katagori, yaitu sebagai tenaga ahli yang berkualitas karena seleksi yang ketat, dan tenaga terampil yang terlatih dengan baik.

4. Di bidang pertahanan keamanan kita bersyukur bahwa selama pembangunan jangka panjang tahap pertama kita berhasil mewujudkan tingkat keamanan nasional yang baik. Dalam dasawarsa yang akan datang pun invasi dari luar diperkirakan kecil kemungkinannya, sehingga gejala dari dalam negerilah yang perlu lebih kita waspadai. Namun demikian hal ini bukan berarti bahwa kita lalu

boleh lengah dan tidak meningkatkan kemampuan dan kekuatan pertahanan keamanan terhadap ancaman dari luar. Suatu kekuatan siap dengan skala tertentu harus senantiasa kita siagakan untuk mengawal wilayah-wilayah rawan selektif. Menyadari keterbatasan kemampuan negara dan sesuai doktrin pertahanan keamanan negara, maka postur pertahanan keamanan negara yang akan kita wujudkan secara normatif akan tetap didasarkan pada konsep sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dengan ABRI yang PEEM sebagai kekuatan intinya.

Menghadapi dinamika pembangunan pada PJP II umumnya Pelita VII khususnya, menuntut peningkatan upaya yang lebih besar, lebih luas, lebih rumit serta menuntut kinerja segenap upaya pembangunan melalui penggerakan secara total seluruh potensi nasional, dengan harapan hasil-hasilnya dapat didayagunakan untuk menunjang tujuan dan kepentingan pembangunan. Tantangan ini memerlukan manajemen pemerintahan yang lebih efektif, lebih efisien sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan secara menyeluruh. Dalam bahasa yang lugas tuntutan ini menuntut ditetapkannya "Manajemen Modern".

Penerapan manajemen modern secara konsisten, konsekuen dan kontinyu dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan pada PJP II umumnya, Pelita VII khususnya. Meskipun manajemen modern melahirkan terminologi yang bermacam-macam, terutama apabila ditinjau dari latar belakang dan kepentingan yang bersangkutan, namun dalam ceramah pembekalan ini, kita tidak akan memperbincangkan perbedaan terminologinya. Persepsi tentang manajemen modern kita coba elaborasikan ke dalam tiga hal utama yaitu: ciri ilmiahnya, ciri fungsionalnya serta ciri perilakunya.

Ciri ilmiah manajemen modern antara lain ditampilkan oleh penggunaan dan pemanfaatan model dan teknik kuantitatif. Pengambilan keputusan menitikberatkan pada data dan informasi yang tepat, cepat dan akurat didasarkan kepada pemikiran kesisteman yang bersifat holistik, komprehensif integral.

Ciri fungsional manajemen modern antara lain ditampilkan oleh proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang didukung oleh piranti manusia, piranti lunak dan piranti keras yang dikemas dalam suatu tatanan interaksi dan interdependensi yang handal, sehingga proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara akurat, cepat namun tetap obyektif karena pengambilan keputusan menitikberatkan kepada tolok ukur baku yang didukung oleh faktor intuisi yang terpercaya.

Ciri perilaku manajemen modern antara lain ditampilkan oleh unjuk kerja kelompok di bawah kepemimpinan yang terpercaya dan didukung oleh kemampuan individu kelompok yang profesional, berpandangan jauh ke depan, selalu bersifat kreatif dan pro-aktif serta mengutamakan sinergisme antar pegawai organisasi. Ketiga ciri di atas pada hakekatnya telah lama membudaya di kalangan Departemen Hankam dan ABRI, sehingga perkembangan manajemen modern serta penerapan di lingkungan Departemen Hankam dan ABRI tidak mengalami hambatan yang berarti.

Manajemen modern merupakan gabungan antara manajemen klasik yang menekankan pada proses, manajemen ilmiah yang menekankan pada pendekatan analisis kuantitatif dan rasional serta manajemen sosiologik-psikologik yang mengutamakan pada karakter dan kualitas manusia atau bangsa sebagai pelaku manajemen. Berangkat dari pengertian ini maka manajemen modern atau sering pula disebut dengan total quality management (TQM) lebih menekankan kepada kualitas keseluruhan sistem yaitu input, proses, lingkungan dan output.

Ditinjau dari pengertian ini, maka sistem dan metoda pembinaan kemampuan komponen kekuatan Hankam Negara pada dasarnya dikembangkan menurut kaidah dan prinsip manajemen modern. Unjuk kerja pembinaan melalui upaya sistemik antar unsur penentu proses pembinaan ke dalam suatu medan interaksi yang terkendali, mengisyaratkan setiap unsur yaitu input, lingkungan, output serta proses dalam sistem, merupakan satu kesatuan yang utuh, masing-masing bagian

mempunyai peran yang dipandang sebagai unsur yang sama pentingnya dan menentukan.

Manajemen modern sebagai wahana dan kerangka kerja dalam pembinaan kemampuan komponen kekuatan Hankam Negara penerapannya amat ditentukan oleh kualitas serta semangat para penyelenggaranya. Oleh sebab itulah maka unsur manusia tetap merupakan faktor kunci dalam penerapan manajemen modern. Berdasarkan logika inilah maka amanat GBHN 1993 yang menetapkan kualitas sumber daya manusia sebagai titik sentral pembangunan merupakan bukti nyata hal di atas.

Manajemen modern menuntut adanya pengaturan kewenangan yang jelas, mulai dari tingkat operasional di lapangan sampai tingkat pusat yang berkait dengan politik negara dan hubungan internasional. Di lain pihak interaksi lintas sektoral manajemen Hankam Negara, mencerminkan perlunya mekanisme dan hubungan fungsional antara Dephankam dan ABRI dengan departemen lain yang ditempuh melalui koordinasi dan kerjasama di bidang sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan. Keberhasilan proses interaksi lintas departemental tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan mengaktualisasikan perangkat manajemen yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip manajemen modern.

Atas dasar kebutuhan memadukan kepentingan lintas sektoral/departemental yang didasari manajemen modern, maka Dephankam bersama departemen lain tengah mengembangkan suatu sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, yang disebut sistem perencanaan strategik nasional (Sisrenstranas), yang mampu mengikat dan memayungi keterlibatan segenap aparatur pemerintahan dalam pembangunan nasional sehingga mampu memadukan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Penerapan manajemen modern di lingkungan Dephankam dan ABRI menuntut persyaratan para komandan dan prajurit untuk bersikap: teliti, tertib, rasional dan terbuka, serta senantiasa mengutamakan kualitas. Inti manajemen modern di lingkungan Hankam Negara tidak lain adalah budaya untuk selalu peka dalam mendengarkan kebutuhan rakyat,

selalu mengupayakan perbaikan secara kontinyu serta selalu mengikutsertakan seluruh elemen Hankam Negara dalam mencapai tujuan kita.

Jumlah penduduk Indonesia merupakan terbesar keempat di dunia. Besarnya jumlah penduduk ini dapat menimbulkan dua keadaan yang sangat bertentangan yaitu memberikan kemakmuran dan kekuatan bangsa atau sebaliknya menimbulkan kemiskinan, kebodohan dan kelemahan. Keadaan yang pertama akan terwujud apabila jumlah penduduk yang besar dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja efektif di semua sektor pembangunan termasuk pembangunan kekuatan Hankam Negara. Sedangkan keadaan yang kedua akan terjadi apabila jumlah penduduk yang besar itu justru hanya merupakan beban di segala segi kehidupan bangsa.

Berbagai kerawanan dari jumlah penduduk yang besar selalu mempunyai aspek ganda baik pada aspek kesejahteraan maupun aspek Hankam. Penyebaran penduduk yang tidak merata selain menimbulkan masalah-masalah transportasi, penyediaan lapangan kerja, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta penyediaan tempat pemukiman yang sangat berat, juga menimbulkan kelemahan-kelemahan pada daerah-daerah miskin penduduk dalam menangkai secara dini setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Tenaga manusia adalah sumber kekuatan Hankam Negara, tenaga manusia tidak saja dinilai dari jumlahnya yang cukup, tetapi lebih-lebih lagi dari kualitasnya yang tinggi. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang tepat akan merupakan sumber kekuatan bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar, dengan kualitas yang rendah akan merupakan faktor kerawanan.

Kualitas sumber daya manusia sebagai aktor pembangunan pada hakekatnya ditentukan oleh dua pilar utama yaitu Imtaq (Iman dan Taqwa) dan Iptek. Dalam bahasa yang lebih umum dikenal dengan kualitas moral-mental, intelektual dan kesamaptaan jasmani. Bagi ABRI hal ini telah diterjemahkan ke dalam standar kualitas moral-mental, standar kualitas intelektual, standar kualitas kesamap-

taan jasmani dan standar kualitas kesehatan prajurit ABRI sesuai dengan tingkat, pangkat dan area penugasannya. Isyarat ini telah ditangkap maknanya oleh kalakyek PKB keuangan antar Sesko Angkatan/Sespim Polri ke dalam tema seminar. Tugas para perwira siswa sesuai penugasan matranya adalah bagaimana mengaktualisasikan standar kualitas di atas, khususnya kualitas keuangan alam sistem dan metoda pembinaan kekuatan.

Perhitungan jumlah prajurit yang cukup, bagi tiap-tiap negara ukurannya berbeda-beda. Pada umumnya negara-negara yang memiliki angkatan bersenjata untuk tujuan pertahanan saja, mengalokasikan 0,2 % jumlah penduduknya, untuk menjadi prajurit, sedangkan untuk negara adikuasa alokasi itu dapat mencapai 1,5%.

Bagi Indonesia dengan perkiraan jumlah penduduk saat ini 190 juta, jumlah anggota tentaranya hanya mencapai 0,15% atau 0,24% apabila termasuk Polri. Di kawasan Asia Tenggara ini angka prosentase tersebut adalah yang terkecil. Untuk mencapai angka prosentase alokasi 0,2% seperti kebanyakan negara lain, maka jumlah anggota ABRI saat ini seharusnya mencapai 380 ribu atau ditambah 110 ribu dari kekuatan sekarang. Inilah sebabnya sering kita persepsikan bahwa ABRI kita itu relatif kecil. Namun, agar kekuatan yang kecil itu mempunyai daya pukul yang besar, haruslah profesional, efisien dan efektif dan modern. Jadi harus mempunyai kualitas yang tinggi.

Secara nasional pembinaan sumber daya manusia itu diselenggarakan melalui jalur pendidikan, jalur pelatihan ketenagakerjaan dan jalur pelayanan kesehatan masyarakat, baik untuk menumbuhkan moral, mental dan motivasi kejuangannya maupun untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan jasmaninya. Dari sumber daya manusia yang terbina dengan baik inilah kemudian disusun kekuatan Hankam Negara.

Sasaran utama pembinaan sumber daya manusia secara nasional dipandang dari kepentingan Hankam Negara adalah pembinaan aspek moral, mental dan motivasi. Kepada setiap warga negara harus ditanamkan rasa cinta bangsa dan tanah air, kesadaran

berbangsa dan bemegara, kesadaran untuk ikut bertanggung jawab atas keselamatan bangsa dan negara, kesadaran sebagai pembela Pancasila, serta kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara.

Perang kemerdekaan kita, menunjukkan secara jelas bahwa angkatan perang yang hanya mengandalkan keunggulan persenjataan tidak dapat mengalahkan rakyat yang memiliki jiwa militansi yang tinggi. Meskipun dalam persenjataan kurang, namun apabila moral, mental dan motivasi untuk berjuang tinggi, tidak akan ada kekuatan luar yang dapat mengalahkannya.

Dasar-dasar pembinaan moral, mental dan motivasi itu diletakkan sejak dini mulai sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi melalui pendidikan pendahuluan bela negara dan kemudian secara berlanjut didinamisasikan dalam kehidupan masyarakat. Proses dinamisasi inilah yang akan menentukan perkembangan rasa kesadaran bela negara pada setiap warga negara, yang akan ditunjukkan dalam sikap nasionalisme, patriotisme dan solidaritas sosial yang tinggi.

Upaya Hankam Negara pada hakekatnya merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara Republik Indonesia yang pengelolannya dilakukan secara nasional dan ditujukan untuk menjamin serta mendukung kepentingan nasional dan semua kebijaksanaan nasional. Dalam melaksanakan pengelolaan Hankam Negara, presiden dibantu Menteri Hankam. Dalam pelaksanaannya Dephankam bekerja sama dengan departemen dan instansi pemerintah lainnya menyusun dan melaksanakan rencana strategik pengelolaan Hankam Negara.

Pembangunan postur Hankam Negara adalah salah satu upaya agar kekuatan Hankam Negara memberi jaminan ambang toleransi intelijen tidak dilampaui. Pembangunan ini tidak berarti harus ada pemekaran kekuatan, terutama apabila kita dapat mengandalkan pada kualitas kesadaran dan mutu partisipasi masyarakat. Saat ini kita menyadari bahwa kemampuan keuangan negara belum memadai oleh karenanya bila siap hanyalah akan berkekuatan normatif minimal, akan tetapi diupayakan se-efisien dan se-efektif

mungkin. Mengingat tingkat kekuatan, sebagai salah satu elemen postur, relatif kecil, maka efektifitas dan efisiensi di dalam menanggulangi ancaman diletakkan pada struktur kemampuan dan gelarnya.

Pada struktur kemampuan ini antara lain diciptakan adanya deteksi dini dan kemampuan untuk memukul dengan reaksi cepat baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat kompartemen strategis. Sedangkan untuk home-base bagi kekuatan-kekuatan pemukul diusahakan sedekat mungkin dengan arah datangnya atau sumber ancaman. Dengan demikian, sungguhpun tingkat kekuatan tidak akan dimekarkan, akan tetapi dengan memanipulasikan kedua elemen postur lainnya dapatlah dicapai efektivitas penangkalan yang baik. Dalam kaitan dengan ini, maka masalah mobilitas dan deteksi dini menjadi sangat kritis.

Mengalir dari paradigma di atas, sasaran pembangunan bidang Hankam pada Pelita VII adalah melanjutkan penataan segenap komponen kekuatan Hankamneg dalam rangka Sishankamrata sesuai dengan perkembangan iptek. Melanjutkan penataan perangkat peraturan perundang-undangan dan perwujudan Ratih dan Linmas secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan; pembangunan ABRI yang lebih profesional, efektif, efisien dan modern (PEEM) agar berkemampuan optimal, baik sebagai kekuatan Hankam maupun sebagai kekuatan Sospol, yang didukung oleh makin mantapnya kemandirian ABRI-rakyat serta makin meningkatnya keterpaduan pembinaan dan penyiapan komponen pendukung Hankamneg.

Jabaran sasaran pembangunan bidang Hankam pada Pelita VII di atas sebagai berikut:

1. *Ratih*

Tertatanya kekuatan Ratih di seluruh wilayah tanah air secara bertahap sesuai kebutuhan. Melanjutkan proyek pelatihan dan pengorganisasian Ratih minimum 1 (satu) satuan setingkat Kompi (SSK) masing-masing di 2 (dua) kompartemen strategis di luar Jawa yang bersumber dari Hansip/Wankamra, Menwa dan Satpam sebagai komponen dasar

kekuatan Hankam Negara sesuai dengan struktur sistem Hankamneg.

2. *Linmas*

Tertatanya sistem dan satuan Linmas sebagai inti penanggulangan awal bencana di tingkat kecamatan dan di lingkungan pekerjaan/proyek vital dan terbentuknya ruang data pusat pengendalian operasional penanggulangan bencana di tingkat pusat, yang bersumber dari rumah sakit, palang merah Indonesia, pasukan pemadam kebakaran, badan koordinasi penanggulangan bencana alam dan lain-lain, sebagai komponen khusus Hankamneg sesuai dengan struktur sistem Hankamneg.

3. *ABRI*

Tertatanya kemampuan ABRI baik secara kualitatif maupun kuantitatif agar lebih mampu, menampilkan postur ABRI yang PEEM, berkemampuan optimal baik sebagai kekuatan Hankam maupun kekuatan Sospol serta didukung oleh semakin mantapnya kemandirian ABRI dengan rakyat.

Di bidang Alutsista ABRI, sasaran yang ingin dicapai ialah pemantapan kekuatan terpusat Kostrad dan Kopassus dan kekuatan Kewilayahan/Kodam, peningkatan kemampuan dan kesiapan satuan-satuan TNI, AL, dan TNI AU, kekuatan tingkat pusat maupun kewilayahan Polri disertai peningkatan status beberapa Polwil menjadi Polda, Poltabes menjadi Polwiltabes, Polsek menjadi Polres dan penambahan jumlah Polsek disesuaikan dengan perkembangan wilayah Pemda setempat.

4. *Pendukung*

Sasaran kemampuan pendukung Hankam Negara adalah terselenggaranya manajemen yang modern dan meningkatkan kemampuan pembinaan dan pendayagunaan wilayah negara, survai dan pemetaan nasional, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, Iptek dan Industri Strategis, pengembangan sumber daya manusia, serta kerjasama internasional bidang Hankam. Bersamaan dengan itu, berbagai perangkat perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Hankamneg dan tata ruang

wilayah pertahanan sebagai bagian dari tata ruang nasional telah dapat tersusun.

Banyak harapan diletakkan pada setiap lulusan Sesko Angkatan/Sespim Polri, karena setiap lulusan adalah perwira terpilih untuk mengemban masa depan ABRI. Dengan semakin beratnya tantangan masa depan, semakin berat pula beban tugas dan tanggung jawab setiap perwira ABRI. Oleh karena itu setiap perwira ABRI harus mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya dalam menyongsong tantangan masa depan.

Setiap generasi perwira ABRI harus mampu menangkap dan menghayati misi generasinya serta mengaktualisasikannya ke dalam setiap perubahan lingkungan strategis. Apabila generasi 1945 mengemban misi merebut kemerdekaan, mempertahankan serta mengisinya, maka generasi 66 mengemban misi memelihara, menjamin kelancaran serta mensukseskan setiap derap pembangunan pada PJPI. Sedangkan generasi selanjutnya mengemban misi untuk turut aktif membina demokrasi Pancasila serta meningkatkan pendidikan politik masyarakat. Untuk itu dituntut pemutahiran daya nalar dan wawasan menatap masa depan, mencermati setiap perubahan yang sedang dan akan terjadi baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional, dalam hal ini nilai dasar kejuangan tetap merupakan akar dari segalanya.

Demikianlah ceramah pembekalan dalam rangka persiapan seminar PKB kejuangan antar Sesko Angkatan/Sespim Polri tahun pelajaran 1995/1996. Mudah-mudahan ceramah pembekalan ini dapat memberikan masukan baik bagi penyiapan makalah seminar maupun pelaksanaan diskusi antar perwira siswa.

Semoga kader-kader pimpinan ABRI masa mendatang akan tetap mampu menjaga jatidiri ABRI.

Lembang, 30 Januari 1996

Menteri Pertahanan Keamanan

td

Edi Sudradjat